







yaitu menyediakan ruang publik untuk warga negara agar dapat terlibat dalam sebuah masyarakat yang demokratis dan rasional. Konten media adalah media itu sendiri di mana dengannya warga dapat terlibat, dan pesan dari media itu, yang melaluinya warga dapat terlibat.

Di satu sisi, produksi konten harus didasarkan pada, dan cerminan dari, kebutuhan warga negara. Namun, gagasan tentang 'kebutuhan' sendiri cukup problematis karena sangat mudah disalahartikan sebagai 'keinginan': tidak semua yang diinginkan adalah yang dibutuhkan. Tetapi, bisnis, termasuk media, beroperasi tepat di logika 'merekayasa keinginan manusia' dan mengartikannya sebagai 'kebutuhan manusia'.

Secara teoritis, satu kebaikan media adalah bahwa media mempunyai kekuatan untuk mendidik warga mengenai apa yang mereka butuhkan, bukan sekedar apa yang mereka inginkan. Media harus, dan sudah seharusnya, mendidik dan 'memberadabkan publik' melalui kontennya.

Kedua, Perkembangan Tekno-ekonomi. Sementara motif profit sudah secara jelas menjadi pendorong utama perkembangan industri media saat ini, inovasi dalam teknologi media juga menjadi faktor yang tidak kalah pentingnya. Kemajuan teknologi, khususnya internet dan media baru, telah mengubah struktur dan model bisnis media. Kemajuan teknologi tidak hanya menyediakan platform baru untuk distribusi konten seperti saat ini, tetapi juga untuk konvergensi media dan strategi digitalisasi yang akan datang. Tetapi, kebijakan media sepertinya tidak mampu mengimbangi kecepatan

perkembangan teknologi dan ekonomi. Ketika kebijakan-kebijakan yang ada saat ini tidak dijalankan untuk membatasi konsentrasi kepemilikan media, belum ada kebijakan yang disiapkan untuk mengantisipasi dampak dari model-model bisnis baru yang berkembang, sebagai konsekuensi dari konvergensi dan digitalisasi media yang akan datang. Sebagian besar peraturan media hanya terfokus pada konten (terlepas dari ketidakmampuannya untuk menjamin keberagaman), dan mengabaikan cara-cara di mana praktik-praktik bisnis baru akan berdampak terhadap hak warga dalam bermedia.

Ketiga, Kebijakan Media. Kebijakan-kebijakan yang ada saat ini amat tertinggal di belakang perkembangan bisnis media. Beberapa kebijakan sebenarnya telah dirumuskan dengan baik, namun diimplementasikan secara buruk. Kebijakan lainnya terlalu ambigu dan secara sengaja diterjemahkan sebagai hal yang menguntungkan bisnis media. KIDP mengajukan tuntutan mengenai UU Penyiaran no. 32/2002 Pasal 18 (1) dan Pasal 34 (4). Meskipun kedua pasal tersebut mengatur kepemilikan dan membatasi jumlah izin yang diberikan kepada institusi penyiaran tunggal, tidak ada pernyataan yang jelas bagaimana efek yang diberikan oleh pembatasan ini. Interpretasi yang tidak jelas dari pasal-pasal ini diinterpretasikan oleh KIDP sebagai dukungan legal atas konglomerasi di bisnis media, yang telah memiliki dampak sangat besar dalam hal akses media dan konten.

Keempat, Bias Keterwakilan. Sepertinya saat ini lebih jelas terlihat, bahwa media di Indonesia lebih mewakili kepentingan pasar daripada





Sedangkan bisnis media adalah pengelolaan media secara ekonomi, atau usaha (bisnis) media secara ekonomis dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan (konsumsi), baik individu, organisasi, maupun masyarakat, dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya dalam rangka mencari laba.

Perkembangan media massa modern menempatkan media tidak lagi dipahami dalam konteks sebagai institusi sosial dan politik belaka melainkan juga harus dilihat dalam konteks institusi ekonomi. Fakta menunjukkan bahwa media telah tumbuh bukan saja sebagai alat sosial, politik dan budaya tapi juga sebagai perusahaan yang menekankan keuntungan ekonomi. Institusi media harus dinilai sebagai dari sistem ekonomi yang juga bertalian erat dengan sistem politik. Inilah yang dimaksudkan bahwa media mempunyai dua karakter yang tak terpisahkan: karakter sosial-budaya-politik dan karakter ekonomi. Faktor ekonomi rupanya menjadi faktor penentu dalam mempengaruhi seluruh perilaku media massa modern.

Faktor pasar bebas dalam seluruh proses komunikasi massa memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam membentuk faktor persaingan dan tuntutan ekonomi menjadi pertimbangan bagaimana media massa kontemporer dibentuk dan dikelola. Industri media tanpa memahami kekuatan yang mempengaruhi media terlebih dahulu. Bagian-bagian dari sebuah institusi media tidak pernah bekerja di luar konteks social yang luas, termasuk konteks ekonomi.

Ekonomi media mempelajari bagaimana industri media memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memproduksi konten dan mendistribusikannya kepada khalayak dengan tujuan memenuhi beragam permintaan dan kebutuhan akan informasi dan hiburan. Media massa selain menjadi representasi ruang publik yang









besarnya jumlah penonton dapat dilihat melalui prediksi ataupun perolehan rating penonton pada sebuah acara. Jika rating tinggi maka tarif iklan juga tinggi, sebaliknya jika rating rendah, maka tarif iklan juga rendah. Biaya margin untuk memancarkan siaran televisi adalah nol meskipun hal ini bergantung pada sebuah sistem distribusi. Pada sebuah siaran televisi dan siaran radio yang standar maka sekali lagi biaya marginnya adalah nol, berbeda dengan pemancar yang dibangun khusus untuk mendapat penonton atau pendengar yang lebih luas. Seperti pada televisi kabel, jaringan menjadi unsur biaya harus dimasukkan dalam penghitungan. Karakteristik ini memiliki implikasi keuangan pada saluran televisi yang baru. Ketika sebuah saluran televisi diluncurkan ke publik, satu-satunya cara untuk menarik penonton adalah melalui program-program yang menarik yang mana program menarik identik dengan biaya tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi televisi untuk memilih. Pertama, apakah berinvestasi melalui program yang menarik (berakibat pada naiknya rating) dengan konsekuensi biaya yang dibutuhkan tinggi tanpa memperhatikan apakah pendapatan yang diterima dapat menutup biaya, ataukah Kedua, dengan berinvestasi melalui program biaya rendah yang bisa berakibat pada turunnya rating. Masing-masing pilihan memiliki nilai positif dan negatif. Dalam dunia pertelevisian, biaya untuk memproduksi sebuah program relatif tetap karena tidak terkait dengan variabel-variabel yang mempengaruhinya (misal jumlah penonton). Maka untuk mengantisipasi kerugian akibat biaya lebih besar dari pada pendapatan, perusahaan televisi







lainnya untuk memproduksi dibatasi oleh ketersediaan sumber daya yang terbatas)

- d. Bisnis media, tidak spesifik menghasilkan komersial produk, tetapi menghasilkan produk kultural (*cultural product*), yang memperkaya khasanah dan keragaman budaya dimasyarakat. Dengan demikian, ekonomi media dapat berkontribusi pada pencerahan dan peningkatan wawasan masyarakat.
- e. Bisnis media menghasilkan produk yang berkaitan dengan pesan (*messages*) dan makna (*meaning*), perlambang (*attribute*) serta nilai-nilai (*values*) dimasyarakat. Oleh karena itu, isi (*content*) produk media bersifat non fisik (*intangible*), sehingga satuan unit konten dari produk media seringkali sulit didefinisikan.
- f. Bisnis media menghasilkan produk yang tidak habis, atau tidak berkurang setelah dikonsumsi oleh konsumen baik pembaca, pendengar ataupun pemirsa. Bila seseorang atau beberapa orang menonton televisi atau mendengar radio, maka ini tidak menghilangkan kesempatan pada orang lain untuk melakukan hal yang sama, baik pada waktu dan tempat yang sama, maupun berbeda. Dengan demikian, produk media ini masuk klasifikasi barang publik (*public goods*). Sementara bisnis lainnya pada umumnya menghasilkan barang dan jasa privat (*private goods*).
- g. Bisnis media dapat menyajikan produk yang sudah dihasilkannya berkali-kali pada konsumen yang lain.



- h. Dalam menyediakan produk tambahan untuk konsumen, pertimbangan biaya tambahan (*marginal cost*) tidak relevan. Pada bisnis lainnya hal ini sangat relevan dan sangat penting agar tambahan produk menghasilkan tambahan keuntungan.
- i. Bagi bisnis media apabila konsumen tidak seperti yang diperkirakan, misalnya relative kecil dari perkiraan semula, maka pengurangan biaya produksi tidak dapat dilakukan. Adapun pada bisnis lainnya, maka kegiatan penghematan atau pengurangan biaya produksi dapat dilakukan, misalnya melalui pengurangan input *variable*. Bagi bisnis media penyiaran hal ini sama sekali sulit dilakukan, karena biaya untuk produksi dan menyiarkan suatu program adalah tetap (*fixed*).

Teori ekonomi media merupakan sebuah pendekatan yang memusatkan perhatian lebih banyak pada struktur ekonomi daripada muatan atau ideologi media. Teori ini fokus ideologi medianya pada kekuatan ekonomi dan mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap struktur pemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media. Menurut tinjauan ini, institusi media harus dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga bertalian erat dengan sistem politik.

Vincent Moscow mengatakan bahwa ekonomi politik dipandang sebagai studi mengenai hubungan sosial, khususnya hubungan kekuatan, yang biasanya berbentuk produksi, distribusi, dan konsumsi dari sumber. Hubungan ini timbul

dalam hubungan timbal balik antara sumber daya alam proses produksi komunikasi seperti surat kabar, buku, video, film, dan khalayak adalah yang utama.

Sedangkan kegunaan ekonomi politik dalam komunikasi adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan signifikansi dari bentuk produksi, distribusi, dan pertukaran komoditas komunikasi serta peraturan yang mengatur struktur media tersebut, khususnya oleh negara. Gaya produksi media dan hubungan ekonomi kemudian menjadi dasar atau elemen penentu dalam pikiran kita.

Masyarakat memerlukan informasi dan juga hiburan dengan berbagai cara. Dan kebutuhan tersebut difasilitasi oleh media yang juga ingin menguatkan kedudukan ekonominya dalam sistem ekonomi masyarakat. Hubungan yang terjadi antara produsen dan konsumen ini menjadi hubungan timbal balik yang berkesinambungan, ketika media massa seperti televisi, surat kabar, dan bahkan internet tunduk pada kepentingan modal, maka kepentingan masyarakat bisa menjadi ambivalen.

Menurut Murdock dan Goldin, efek kekuatan ekonomi tidak secara langsung secara acak, tetapi terus-menerus: "Pertimbangan untung rugi diwujudkan secara sistematis dengan memntapkan kedudukan kelompok-kelompok yang sudah mapan dalam pasar media massa besar dan mematikan kelompok-kelompok yang tidak memiliki modal dasar yang diperlukan untuk mampu bergerak. Oleh karena itu, pendapat yang dapat diterima berasal dari kelompok yang cenderung tidak melancarkan kritik terhadap distribusi kekayaan

dan kekuasaan yang berlangsung. Sebaliknya, mereka yang cenderung menantang kondisi semacam itu tidak dapat mempublikasikan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan mereka karena mereka tidak mampu menguasai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan komunikasi efektif terhadap khalayak luas.

Ada 3 konsep untuk aplikasi pendekatan ekonomi politik dalam industri komunikasi yang ditawarkan Moscow:

1. *Commodification* (komodifikasi). Konsep ini mengacu pada pemanfaatan barang dan jasa yang dilihat dari kegunaannya kemudian ditransformasikan menjadi komoditi yang bernilai jual pasar. Bentuk komodifikasi dalam komunikasi ada tiga macam: *intrinsic commodification* (komodifikasi intrinsik), *extrinsic commodification* (komodifikasi ekstrinsik), dan *cybernetic commodification* (komodifikasi sibernatik).
2. *Spatialization* (spasialisasi) adalah proses untuk mengatasi hambatan ruang dan waktu dalam kehidupan sosial oleh perusahaan media dalam bentuk perluasan usaha seperti proses integrasi: integrasi horizontal, vertikal, dan internasionalisasi.
3. *Structuration* (strukturasi), yakni proses penggabungan human agency (agensia manusia) dengan proses perubahan sosial ke dalam analisis struktur. Karakteristik penting dari teori strukturisasi ialah kekuatan yang diberikan pada perubahan sosial, yang menggambarkan bagaimana struktur diproduksi







efisiensi kedua jenis layanan-audiovisual dan telepon didistribusikan bersama-sama diseluruh infrastruktur komunikasi yang sama. Dengan demikian, perusahaan media dapat juga melakukan usaha sebagai penerbit surat kabar dan penenrbit majalah, menjadi perusahaan televisi dan menyelenggarakan siaran radio, sehingga dapat memperluas pasar secara diagonal.

Secara bisnis, manfaat dari strategi ekspansi diagonal ini adalah melakukan penyebaran resiko usaha, memperbaiki skala ekonomi dan lingkup ekonomi. Saat ini banyak perusahaan media melakukan strategi ekspansi diagonal. Kecenderungan seperti diatas, membuat konsentrasi kepemilikan media menjadi meningkat. Bila hal ini terus terjadi, maka lalu lintas informasi berada dalam kekuasaan segelintir perusahaan besar, pada ujungnya akan menimbulkan ketimpangan yang makin lebar.